

**EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK
TANI PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN KARO**

SKRIPSI

**OLEH:
BINA LORENSIA BR SEMBIRING
198520056**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

**EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK
TANI PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN KARO**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area**



OLEH :

BINA LORENSIA BR SEMBIRING

NPM. 198520056

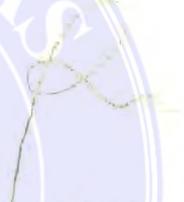
**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Evaluasi Program Pemberdayaan Kelompok Tani pada Dinas ...
Pertanian Kabupaten Karo
Nama : Bina Lorensia Br Sembiring
NPM : 198520056
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing,


Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si
Pembimbing I


Khairunnisa Lubis, S.Sos, M.I.Pol
Pembimbing II

Mengetahui:


Dr. Walid Musthafa, S. Sos, M.IP
Dekan


Dr. Dss. Indra Muda, MAP
Ketua Program Studi

Tanggal Lulus : 22 Maret 2024

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertandatangan berikut ini;

Nama : Bina Lorensia Br Sembiring
Npm : 198520056
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tugas Akhir / Skripsi

Saya menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi yang berjudul “**EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KARO**”. Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S1) dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Medan, 22 Maret 2024



Bina Lorensia Br Sembiring
NPM . 198520056

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas Medan Area, Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : Bina Lorensia Br Sembiring
NPM : 198520056
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **"EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KARO"**. beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 22 Maret 2024



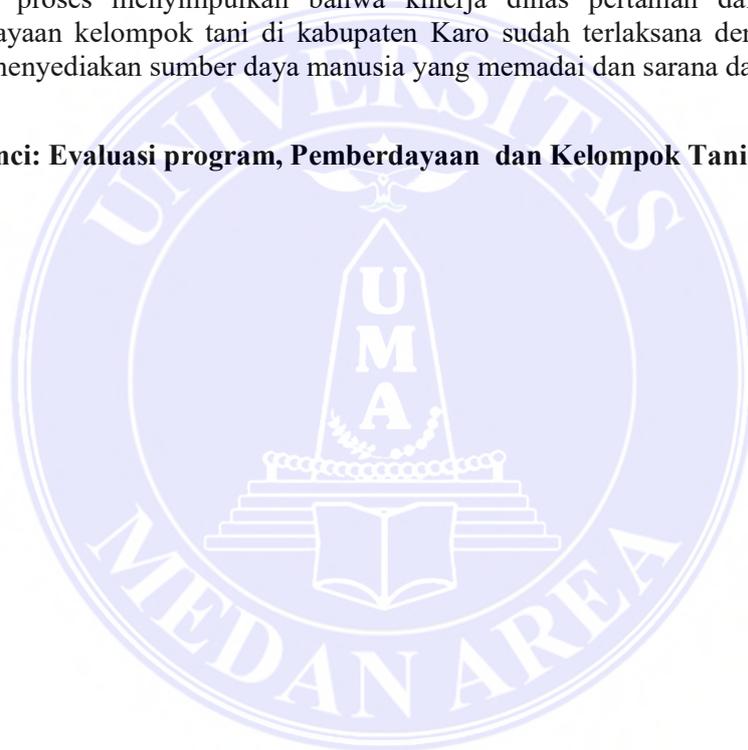
Bina Lorensia Br Sembiring

Npm. 198520056

ABSTRAK

Evaluasi Program Pemberdayaan Kelompok Tani Pada Dinas Pertanian Kabupaten Karo saat ini belum menyeluruh karena terdapat beberapa hambatan dalam melakukan program pemberdayaan kelompok tani. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Evaluasi Progran Pemberdayaan Kelompok Tani pada Kabupaten Karo serta mengetahui faktor penghambat Dinas Pertanian Dalam Menjalankan Program Pemberdayaan Kelompok Tani. Teori yang digunakan yaitu teori Evaluasi menurut Stufflebeam yang terdiri dari konteks, masukan, Proses, Evaluasi dengan menggunakan metode kualitatif dimana rumusan masalah dipecahkan melalui wawancara, observasi hasil pengamatan dan menggambarkan keadaan yang berdasarkan fakta yang sesuai dengan kenyataan. kajian ini menyimpulkan bahwa indikator Evaluasi konteks sudah terlaksana dengan baik karena dinas pertanian sudah mengerti apa saja masalah yang dialami kelompok tani. indikator Masukan sudah terlaksana dengan baik karena dinas pertanian sudah melakukan pelatihan dan pembinaan kepada kelompok tani. indikator proses menyimpulkan bahwa kinerja dinas pertanian dalam pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani di kabupaten Karo sudah terlaksana dengan baik karena mereka menyediakan sumber daya manusia yang memadai dan sarana dan prasarana yang cukup.

Kata kunci: Evaluasi program, Pemberdayaan dan Kelompok Tani



ABSTRACT

Evaluation of the Farmer Group Empowerment Program at the Karo Regency Agriculture Office is currently not comprehensive because there are several obstacles in running the farmer group empowerment program. this study aims to determine and describe the Evaluation of the Farmer Group Empowerment Program in Karo Regency and find out the inhibiting factors of the Agriculture Office in Running the Farmer Group Empowerment Program. The theory used is the theory of evaluation according to Stufflebeam which consists of context, input, process, evaluation using a qualitative method where the formulation of the problem is solved through interviews, observations of observations and describing the situation based on facts in accordance with reality..

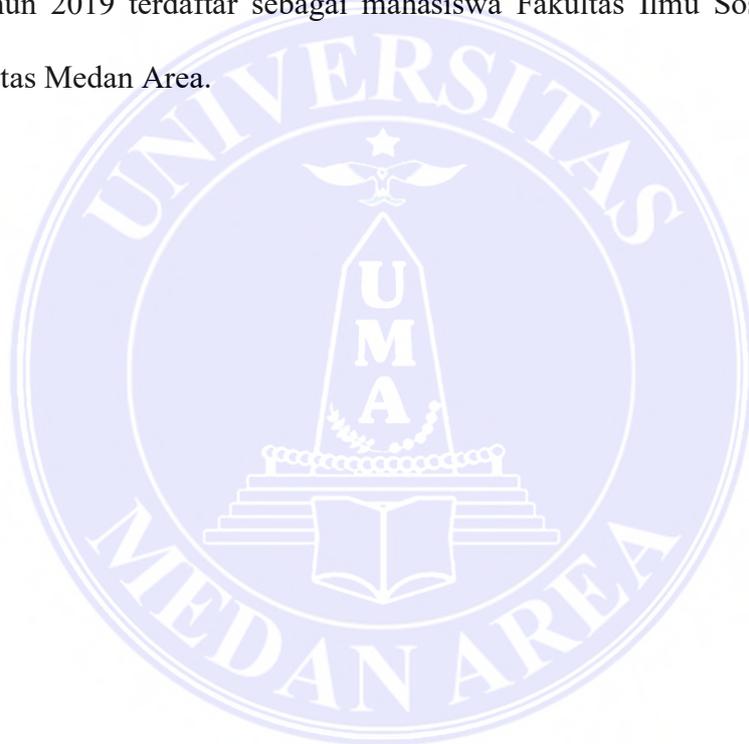
Keywords: Program evaluation, Farmer Group Empowerment, Agriculture Office, Karo Regency.



RIWAYAT HIDUP

Saya dilahirkan di Berastagi pada tanggal 22 Agustus 2001 dari ayah Laksana Sembiring dan ibu Rasmita Ulina Br Purba. Saya merupakan putri kedua dari empat bersaudara.

Tahun 2019 saya lulus dari SMA SWASTA MASEHI BERASTAGI dan pada tahun 2019 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KARO”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Administrasi Publik (S-1) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bantuan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, terutama kepada kedua orang tua kandung peneliti Ayahanda dan Ibunda atas doa dan dukungan, bimbingan serta kasih sayang yang telah diberikan materil maupun moral. Dalam kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Dadan Ramdan,M.Eng,M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Walid Musthafa, S.Sos, M.IP selaku dekan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. Drs. Indra Muda, M.AP selaku Kaprodi Fakultas ilmu sosial dan politik
4. Ibu Novita Wulandari, S.ST, M.Si selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah memberikan arahan dan memberikan waktu selama penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Khairunnisah Lubis S.Sos,M.I.Pol selaku Dosen Pembimbing II saya yang telah memberikan arahan dan memberikan waktu selama penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Hikmawan Syahputra, S.IP, MA selaku Sekretaris yang telah memberikan arahan dan motivasi
7. Seluruh dosen dan Staff pegawai Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
8. Seluruh Staff dari Dinas Pertanian Kabupaten Karo yang menjadi Informan dan membantu memberikan informasi yang sangat berguna dalam penelitian ini
9. Kepada kedua Orang Tua Peneliti, yaitu bapak Laksana Sembiring dan ibu Rasmita Ulin Br Purba yang selalu mendoakan peneliti dan mendukung setiap aktivitas, serta atas doa restu yang selalu mengiringi
10. Adik saya tercinta, Brina Lolita Br Sembiring yang selalu menemani dan membantu saya dalam melakukan penelitian skripsi ini.
11. penulis mengucapkan terima kasih kepada sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kepada pembaca untuk memberikan saran/kritik yang bersifat positif demi kesempurnaan skripsi ini, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Medan , 22 Maret 2024

Bina Lorensia
Npm. 198520056

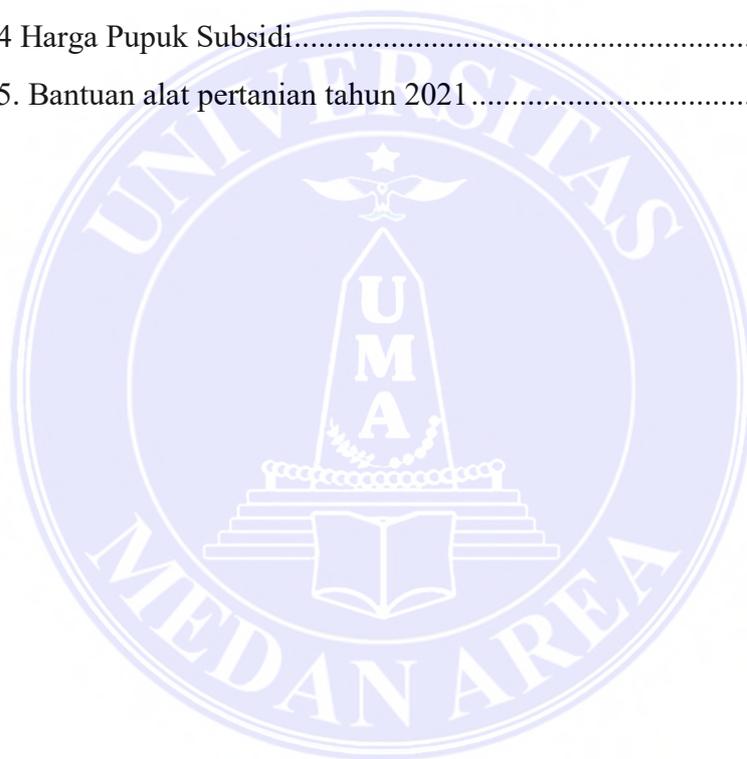
DAFTAR ISI

ABSTRAK	
ABSTRACT	
RIWAYAT HIDUP	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Definisi Evaluasi Program	10
2.1.1 Tujuan Evaluasi Program	14
2.1.2 Manfaat Evaluasi Program	15
2.1.3 Sasaran Evaluasi Program	16
2.1.4 Langkah-langkah Evaluasi Program	17
2.1.5 Model-model Evaluasi Program	17
2.2 Definisi Pemberdayaan Masyarakat	24
2.2.1 Tujuan dan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat	27
2.2.2 Prinsip Pemberdayaan	30
2.3 Petani dan Kelompok Tani	32
2.3.1 Definisi Petani	32
2.3.2 Definisi dan Tujuan Kelompok Tani	33
2.4. Peraturan Pembentukan Program Pemberdayaan	32
2.5 Kerangka Berpikir	34
2.6 Penelitian Terdahulu	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian	40

3.2 Informan Penelitian.....	41
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.4 Teknik Analisis Data.....	45
3.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	46
3.5.1 Lokasi Penelitian.....	46
3.5.2 Jadwal Penelitian	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Hasil Penelitian	47
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Karo	47
4.1.2 Peraturan Pembentukan Dinas Pertanian Kabupaten Karo.....	48
4.1.3 Visi Dan Misi Dinas Pertanian Kabupaten Karo	49
4.1.4 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Karo	49
4.1.5 Skruktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Karo.....	50
4.2 Pembahasan Penelitian.....	54
4.2.1 Evaluasi Program Pemberdayaan Kelompok Tani	55
4.2.2 Faktor Penghambat Program Pemberdayaan Kelompok Tani...	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah penyuluh Pertanian	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	37
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	42
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	46
Tabel 4.1 Kependudukan Kabupaten Karo	51
Tabel 4.2 Jumlah Petani Di Kabupaten Karo.....	52
Tabel 4.3 Jumlah Kelompok Tani Di Kabupaten Karo.....	53
Tabel 4.4 Harga Pupuk Subsidi.....	54
Tabel 4.5. Bantuan alat pertanian tahun 2021.....	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Karo.....	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Pedoman Wawancara	73
Lampiran II. Pedoman Wawancara.....	76
Lampiran III Hasil Wawancara.....	79
Lampiran IV Hasil Dokumentasi	80
Lampiran V Surat Selesai Riset	85



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah. Mulai dari alam untuk wisata dan kekayaan alam yang dapat diproduksi menjadi sumber energi bagi manusia, salah satunya berasal dari sektor pertanian. Pertanian merupakan sektor yang cukup penting bagi bangsa Indonesia, karena pertanian merupakan mata pencaharian sebagian besar masyarakat di seluruh Indonesia dan menjadi salah satu sumber perekonomian di Indonesia. Namun, pertanian di Indonesia rata-rata masih dilakukan secara tradisional. Mulai dari alat yang digunakan, teknik penanaman dan perawatan juga dilakukan secara tradisional, padahal kebutuhan akan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia semakin besar dan jika terus-menerus dilakukan secara tradisional kebutuhan pangan tersebut tidak akan terpenuhi sehingga pemerintah harus mengimpor dari Negara lain (Dumasari, 2020).

Pengeluaran Negara Indonesia termasuk cukup besar padahal Negara kita memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah yang belum diolah secara maksimal. Padahal jika Negara kita mampu mengolah kekayaan alam tersebut, Negara tentu tidak perlu mengimpor kebutuhan pangan dari Negara lain bahkan Negara kita juga yang seharusnya mengeksport hasil alam kita ke Negara lain, dengan begitu perekonomian kita juga semakin meningkat. Lahan pertanian yang terbentang luas di dataran tinggi karo menjadi salah satu sumber pertanian

unggulan di daerah Sumatera Utara. Tanah karo yang berbatasan langsung dengan kabupaten Deli Serdang, kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi dan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, yang di dalamnya ada terdapat gunung sinabung, gunung sibayak dan perbukitan yang mengakibatkan tanah di kabupaten Karo ini menjadi lahan subur dan sangat cocok untuk tanaman muda dan beberapa jenis tanaman tua, hal ini membuat sektor pertanian terutama hasil sayur mayur dan buah-buahan berkembang pesat di tanah. Persoalan harga hasil pertanian di pasaran masih banyak dikeluhkan petani di tanah karo karena harga pasaran masih belum stabil karena harganya bisa berubah setiap harinya. Salah satu pemicu hal itu terjadi karena petani di tanah karo jika ada satu jenis hasil pertanian yang harganya mahal, maka para petani akan menanam jenis tanaman itu juga sehingga ketersediaan akan jenis pertanian itu akan membludak di pasaran dan hal itu akan membuat hasil pertanian jenis itu akan murah di pasaran karena terlalu mudah didapatkan sehingga hal tersebut akan membuat petani mengalami kerugian karena tidak balik modal atas hasil panen yang mereka terima apalagi harga benih, pupuk, dan pestisida untuk tanaman semakin melonjak harganya yang membuat petani semakin kesusahan dan terbebani.

Undang-undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; melindungi Petani dari kegagalan panen dan risiko harga; menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani; menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani

kepentingan Usaha Tani; meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Usaha Tani. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah atau LSM yang bertanggung jawab yaitu Dinas Pertanian, salah satunya melalui komunitas kelompok tani. Karena setiap masyarakat hidup dalam bentuk dan dikuasai oleh lembaga-lembaga tertentu. Yang dimaksudkan lembaga (*institution*) di sini adalah organisasi atau kaidah-kaidah, baik formal maupun informal, yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan-kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu.

Kelompok tani ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk mendapat perhatian dan bantuan dari pemerintah daerah dan juga LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang menaungi yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Karo. Berdasarkan SK Menteri Pertanian RI Nomor: 273/Kpts/OT.160/4/2007, kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas kesamaan, kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan, (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Kelompok tani pada umumnya adalah organisasi non-formal yang ada di pedesaan yang ditumbuh kembangkan “ **dari, oleh dan untuk petani**” yang memiliki kesamaan pandangan dan kepentingan yang sama dalam pertanian, adanya kawasan usaha tani yang menjadi tanggungan bersama, adanya kader yang menggerakkan para petani, adanya kegiatan yang dimanfaatkan serta adanya dorongan dari pemerintah daerah/desa.

Lembaga-lembaga dalam masyarakat desa ada yang bersifat asli berasal dari adat kebiasaan yang turun temurun tetapi ada pula yang baru diciptakan baik dari dalam maupun dari luar masyarakat desa. Administrasi yang baik menjamin lancarnya hubungan antara pemerintah beserta program nasionalnya dengan aparat pelaksana pada berbagai tingkat, dengan petani produsen, pedagang dan lain-lain yang mempunyai hubungan dengan kegiatan ekonomi. Para petugas yang merupakan pelaksana kebijaksanaan Departemen Pertanian antara lain adalah kepala Dinas Pertanian Kabupaten. Kepala Dinas dalam kenyataan harus bekerja sama dan dibantu oleh kepala-kepala Dinas Pembangunan Masyarakat Desa, pengairan dan perdagangan. Para petugas ini dengan melalui hierarki vertikal masing-masing mendapatkan instruksi dan pedoman-pedoman kerja tertentu dalam melaksanakan suatu program nasional. Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik para pejabat pelaksana di setiap daerah harus mampu memahami latar belakang setiap program pemerintah sejauh program itu menyangkut bidang tugasnya. Tanpa pengetahuan seperti itu maka akan terjadi kesalahan-kesalahan teknis dalam pelaksanaan tugasnya. Sebaliknya untuk menjamin agar para pelaksana ini mampu dengan cepat memahami maksud dan tujuan setiap program pemerintah, setiap instruksi dan pedoman haruslah dibuat jelas dengan sistem dan patokan-patokan tertentu.

Administrasi yang baik merupakan kunci dari berhasilnya program-program kebijaksanaan pemerintah. Tetapi di samping sebagai pelaksana kebijaksanaan dan program pemerintah para pejabat yang berhubungan dengan pembangunan pertanian harus pula mampu melayani keperluan petani, menerima dan memperhatikan persoalan-persoalannya dan berusaha sejauh mungkin

membantu mengatasi persoalan-persoalan itu. Jika pejabat itu sendiri tidak merasa mampu dan kompeten dalam memecahkan sesuatu persoalan tertentu, maka segera dibicarakan dengan kolega pejabat yang dibicarakan dengan kolega pejabat yang bersangkutan dan kalau perlu diteruskan ke atasnya untuk mendapat perhatian. Salah satu syarat yang harus dipenuhi para pejabat yang selalu berhubungan dengan petani adalah bahwa mereka itu harus bersikap simpatik pada setiap persoalan yang dihadapi petani. Mereka harus dapat menjaga keseimbangan antara keperluan melaksanakan kebijakan dan mencapai target yang telah disusun pemerintah pusat dengan tanggapan dan kemampuan petani serta kenyataan yang ada di lapangan. Para pembuat kebijaksanaan di tingkat pusat selalu mengharapkan laporan-laporan dan evaluasi yang obyektif dari setiap program untuk bahan perbaikan waktu-waktu yang akan datang. Seorang pelaksana atau birokrat yang baik tidak akan menghindarkan laporan-laporan yang kurang baik. Melaporkan keadaan yang kurang baik dengan obyektif adalah jalan menuju perbaikan pada masa mendatang. Sebaiknya usaha yang menutupi sesuatu yang kurang baik adalah jalan menuju kegagalan yang terus-menerus.

Peneliti di India, Guy Hunter menyimpulkan bahwa persoalan administrasi pembangunan pertanian pada pokoknya menyangkut empat hal, yaitu:

1. Koordinasi di dalam tindakan-tindakan administrasi pemerintah dalam rangka melayani keperluan petani yang bermacam-macam seperti informasi-informasi pertanian, bantuan teknik, investasi dan persoalan kredit, pemasaran dan lain-lain.
2. Pola hubungan yang senantiasa berubah antara jasa-jasa para pedagang atau koperasi.

3. Masalah mendorong partisipasi petani dan penduduk desa dalam keseluruhan usaha pembangunan pertanian.
4. Masalah kelembagaan yaitu keperluan akan lembaga-lembaga dan organisasi-organisas tertentu pada tahap pembangunan yang senantiasa berubah.

Dinas Pertanian Kabupaten Karo sudah melakukan program pemberdayaan dengan melakukan pembinaan kelompok tani melalui penyuluhan, karena harga dan hasil-hasil pertanian dan sarana-sarana produksi berhubungan erat dengan kebijaksanaan pertanian maka para penyuluh pertanian juga mempunyai tugas penting untuk menafsirkan setiap kebijaksanaan pemerintah yang menyangkut kepentingan petani baik-baik langsung maupun tidak langsung. Juga dalam hal ini para penyuluh pertanian yang baik adalah sahabat petani yang siap membantu mereka dalam mengatasi kesulitan-kesulitan, mempelajari tanggapan-tanggapan dan meneruskan keluhan-keluhan yang mungkin dikemukakan oleh petani mengenai kebijaksanaan pertanian tertentu. Patra penyuluh harus selalu berusaha mendorong terus menerus para petani dengan berbagai cara. penyuluhan pertanian untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok tani. Upaya-upaya dari Dinas Pertanian dalam memberdayakan kelompok tani seperti memberikan. bantuan benih, bantuan pupuk, kemudian pestisida dan juga alat lainnya seperti traktor dan alat mesin produksi lainnya. Berikut adalah tabel jenis-jenis komoditas pertanian yang ada di Kabupaten Karo. Namun karena jumlah penyuluh yang terbatas membuat pelaksanaan program pemberdayaan kelompok tani ini agar merata dirasakan

kelompok tani masih belum terwujud. Dari data Dinas pertanian kabupaten karo saat ini penyuluh pertanian di Kabupaten Karo hanya terdiri dari 59 orang.

Tabel 1.1 Jumlah Penyuluh Pertanian Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah penyuluh Pertanian
1	Barusjahe	19	4
2	Berastagi	6	2
3	Dolat Rayat	7	2
4	Juhar	25	5
6	Kabanjahe	8	2
7	Kuta Buluh	16	3
8	Lau baleng	15	4
9	Mardinding	12	3
10	Merdeka	9	2
11	Merek	19	4
12	Munte	22	5
13	Naman teran	14	3
14	Payung	8	2
15	Simpang empat	17	4
16	Tiga binanga	19	5
17	Tiganderket	17	4
18	Tigapanah	26	5

Sumber: Dinas Pertanian 2022

Karena jumlah penyuluh pertanian yang belum memadai membuat proses pelaksanaan program pemberdayaan kelompok tani belum merata dirasakan kelompok tani karena jumlah yang sampai saat ini tercatat di data Dinas Pertanian Kabupaten Karo kelompok tani yang terdiri dari kurang lebih 3000 kelompok tani.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan yang diuraikan di atas yaitu **“Evaluasi Program Pemberdayaan Kelompok Tani Pada Dinas Pertanian Kabupaten Karo”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Evaluasi Program Pemberdayaan Kelompok Tani pada Dinas Pertanian Kabupaten Karo?

2. Apa faktor penghambat Dinas Pertanian dalam menjalankan program pemberdayaan kelompok tani di Kabupaten Karo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Evaluasi Program Pemberdayaan Kelompok Tani Pada Kabupaten Karo
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Dinas Pertanian Dalam menjalankan Program Pemberdayaan Kelompok Tani di Kabupaten Karo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang Administrasi Publik dan dapat menambah Ilmu Pengetahuan berkaitan dengan Evaluasi Program Pemberdayaan Kelompok Tani Pada Dinas Pertanian Kabupaten Karo

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penelitian yang berkaitan dengan Evaluasi Program Pemberdayaan Kelompok Tani Pada Dinas Pertanian Kabupaten Karo dan penelitian yang dilakukan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dibidang yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Evaluasi Program

Evaluasi adalah bagian dari suatu penelitian. Evaluasi merupakan proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan program dapat tercapai. Evaluasi merupakan alat untuk menganalisis dan menilai fenomena dan aplikasi ilmu pengetahuan. Sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mandiri, ilmu evaluasi didukung oleh sejumlah teori. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan guna di pertanggung jawabkan kepada yang tercapai serta untuk melihat sejauh mana tujuan tercapai serta untuk melihat sejauh mana kesenjangan antara ekspektasi dengan kenyataan.

Pendapat Anderson dalam Winarno (2008) mengemukakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut". Suharsimi Arikunto (2010) mengemukakan evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi mengenai bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan.

Suchman dalam Arikunto dan Jabar (2010) memandang bahwa, "evaluasi sebagai proses penentuan hasil yang dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung pencapaian tujuan". Stufflebeam dalam Arikunto dan Jabar

(2010: 2) mengatakan bahwa evaluasi adalah proses kegiatan pengukuran, menilai, menganalisis terhadap program atau kebijakan untuk menentukan hasil dari tujuan yang telah ditetapkan, sebagai pedoman pengambilan Langkah di masa yang akan datang.

Program merupakan suatu rencana yang melibatkan berbagai unit yang berisikan kebijakan serta rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Dalam kamus (a) program adalah rencana, (b) program adalah kegiatan yang dilakukan dengan seksama. Pendapat Suharsimi Arikunto (2004) program dapat dipahami dalam dua pengertian yaitu secara umum dan khusus. Pengertian program secara umum, dapat diartikan sebagai rencana atau rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh seseorang di kemudian hari. Sedangkan pengertian program secara khusus biasanya dikaitkan dengan evaluasi yang berarti suatu kesatuan atau unit kegiatan yang merupakan implementasi atau realisasi suatu kebijakan, berlangsung dalam proses berkesinambungan dan terjadi dalam satu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Secara khusus, sebuah program adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dengan waktu pelaksanaan yang panjang. Selain itu, sebuah program tidak hanya terdiri dari suatu kegiatan namun, merupakan suatu rangkaian kegiatan yang membentuk satu sistem yang saling terkait satu sama lain dengan melibatkan lebih dari satu orang untuk melaksanakannya. Isaac dan Michael (1984) mengatakan sebuah program harus diakhiri dengan evaluasi. Hal ini dikarenakan apakah program tersebut berhasil menjalankan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut mereka, ada tiga tahap rangkaian evaluasi program yaitu: (1) menyatakan

pertanyaan serta menspesifikasikan informasi yang hendak diperoleh, (2) mencari data yang relevan dengan penelitian dan (3) menyediakan informasi yang dibutuhkan pihak pengambil keputusan untuk melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan program tersebut.

Evaluasi program merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan suatu program. Melakukan evaluasi program ialah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang telah direncanakan (Suharsimi Arikunto, 2009).

Tyler dalam Arikunto dan Jabar (2009) berpendapat bahwa, evaluasi program merupakan proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan telah terealisasikan. Selanjutnya menurut Cronbach (1963) dan Stufflebeam (1971) yang dikutip oleh Arikunto dan Jabar (2009: 5), evaluasi program merupakan upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan.

Dapat disimpulkan bahwa evaluasi program merupakan rangkaian kegiatan pengumpulan data atau informasi ilmiah yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif kebijakan program dimasa akan datang. Karenanya, dalam keberhasilan suatu evaluasi program ada dua konsep yang terdapat didalamnya yaitu efektifitas dan efisiensi. Efektifitas adalah perbandingan antara output dan input sedangkan efisiensi merupakan taraf pendayagunaan input untuk menghasilkan output melalui suatu proses.

Evaluasi program adalah segala sesuatu yang dilakukan dengan harapan akan mendatangkan hasil atau manfaat. Evaluasi program dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh unsur-unsur implementasi program. Hal ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana program tersebut berhasil mencapai maksud pelaksanaan dari program yang telah ditetapkan sebelumnya. Tanpa adanya evaluasi, program-program yang berjalan tersebut tidak dapat dilihat tingkat pencapaian tujuannya. Keterlaksanaan (implementasi) program dalam pencapaian tujuannya sangat ditentukan oleh banyak faktor yang saling berkaitan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh proses program adalah sebuah sistem, oleh karenanya dalam melaksanakan evaluasi perlu adanya pendekatan sistem dan berpikir secara sistemik.

2.1.1. Tujuan Evaluasi Program

Mulyatiningsih (2011), mengemukakan evaluasi program dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: a) Menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan suatu organisasi. Hasil evaluasi ini penting untuk pengembangan program yang sama ditempat lain. b) Mengambil keputusan mengenai keberlanjutan sebuah program, apakah program perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan.

Evaluasi program dapat dikatakan salah satu bentuk penelitian evaluatif. Oleh karena itu, dalam suatu evaluasi program, pelaksana berfikir serta menentukan langkah bagaimana melaksanakan penelitian. Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2009), mengatakan terdapat perbedaan yang mencolok antara penelitian dan evaluasi program adalah sebagai berikut: (a)

Dalam penelitian, peneliti ingin mengetahui gambaran mengenai sesuatu yang kemudian hasilnya dideskripsikan, sedangkan dalam evaluasi program pelaksanaan ingin mengetahui seberapa tinggi kondisi atau mutu sesuatu dari hasil pelaksanaan program, setelah data yang terkumpul dibandingkan dengan standar atau kriteria tertentu. (b) Dalam kegiatan penelitian, peneliti dituntut oleh rumusan masalah karena ingin mengetahui jawaban dari penelitiannya, sedangkan dalam evaluasi program pelaksanaan ingin mengetahui tingkat ketercapaian tujuan program, dan jika tujuan belum tercapai sebagaimana ditentukan, pelaksanaan ingin mengetahui letak kekurangannya serta penyebabnya. Setiap kegiatan yang dilaksanakan mempunyai tujuan tertentu, demikian juga dengan evaluasi.

Arikunto (2004), mengatakan terdapat dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan pada program secara keseluruhan sedangkan tujuan khusus difokuskan pada tiap-tiap komponen.

Evaluasi program merupakan penelitian evaluatif. Pada dasarnya penelitian evaluatif dimaksudkan untuk mengetahui akhir dari suatu kebijakan, dalam rangka menentukan rekomendasi atas kebijakan yang lalu, yang pada tujuan akhirnya adalah untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Suatu program harus senantiasa dievaluasi untuk melihat sejauh mana implementasi program tersebut telah berhasil mencapai tujuan pelaksanaan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Keefektifitasan program yang berjalan tidak dapat dilihat jika tidak dilakukan evaluasi program. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan baru sehubungan dengan program tersebut akan didukung oleh suatu data. Karenanya, evaluasi program bertujuan untuk menyediakan informasi dan data, serta rekomendasi bagi pengambil kebijakan (*decision maker*) untuk memutuskan

apakah akan melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan sebuah program. Jadi evaluasi program adalah upaya untuk mengukur ketercapaian program, yaitu mengukur sejauh mana sebuah kebijakan dapat terimplementasikan.

Evaluasi program dilakukan dengan cara yang sama dengan penelitian. Jadi, evaluasi program merupakan penelitian dengan ciri khusus, yaitu melihat keterlaksanaan program sebagai realisasi kebijakan, untuk menentukan tindak lanjut dari program yang dimaksud. Keduanya dimulai dari menentukan sasaran (variabel), kemudian membuat kisi-kisi, menyusun instrumen, mengumpulkan data, analisis data, serta mengambil kesimpulan. Yang membedakan adalah langkah akhirnya. Jika kesimpulan penelitian diikuti dengan saran maka evaluasi program selalu harus mengarah pada pengambilan keputusan, sehingga harus diakhiri dengan rekomendasi kepada pengambil keputusan. Untuk mempermudah mengidentifikasi tujuan evaluasi program, perlu memperhatikan unsur-unsur dalam kegiatan atau penggarapannya. Ada tiga unsur penting di dalam kegiatan atau penggarapan suatu kegiatan, yaitu: *what* (apa yang digarap), *who* (siapa yang menggarap), dan (*how*) bagaimana menggarapnya.

2.1.2. Manfaat Evaluasi Program

Kegiatan evaluasi sangat berguna bagi pengambilan keputusan dan kebijakan lanjutan dari program, karena dari masukan hasil evaluasi program itulah para pengambil keputusan akan menentukan tidak lanjut dari program yang sedang atau telah dilaksanakan. Wujud dari basil evaluasi adalah sebuah rekomendasi dari peneliti untuk pengambil keputusan (*decision maker*).

Suharsimi Arikunto (2012) mengatakan bahwa ada empat kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil dalam pelaksanaan sebuah program keputusan, yaitu: (a) Menghentikan program, karena dipandang bahwa program tersebut tidak ada manfaatnya, atau tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan. (b) Merevisi program, karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan harapan (terdapat kesalahan tetapi hanya sedikit). (c) Melanjutkan program; pelaksanaan program menunjukkan bahwa segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat. (d) Desimilasi atau menyebarluaskan program (melaksanakan program di tempat-tempat lain atau mengulangi lagi program di waktu lain), karena program tersebut berhasil dengan baik maka sangat baik jika dilaksanakan lagi di tempat dan waktu yang lain.

2.1.3. Sasaran Evaluasi Program

sasaran evaluasi program, peneliti perlu mengenali program dengan baik, terutama komponen-komponennya, karena yang menjadi sasaran evaluasi bukan program secara keseluruhan tetapi komponen atau bagian program. Tujuan umum harus dijabarkan menjadi tujuan khusus, maka sasaran peneliti diarahkan pada komponen agar pengamatannya dapat lebih cermat dan data yang dikumpulkan lebih lengkap. Untuk itulah maka peneliti hendaknya memiliki kemampuan mengidentifikasi komponen program yang akan dievaluasi.

2.1.4. Langkah-langkah Evaluasi Program

Langkah-langkah evaluasi program menurut Oemar Hamalik (2008) adalah sebagai berikut: a) Menyusun suatu rencana evaluasi dalam bentuk kisikisi apa

yang akan dinilai berkaitan dengan tujuan program. b) Menyusun instrumen evaluasi, misalnya. skala, daftar rentang, pedoman observasi/ kuesioner, pedoman wawancara, pedoman dokumentasi. c) Melaksanakan pengamatan lapangan, yaitu mengumpulkan data dari responden atau sampel evaluasi. d) Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, selanjutnya dapat ditentukan tingkat keberhasilan program, kelemahan -kelemahan atau kendala-kendala untuk diperbaiki. e) Mengajukan sejumlah rekomendasi terhadap program yang telah dievaluasi tersebut. f) Menyusun laporan evaluasi dan menyebarluaskan hasil evaluasi kepada pihak yang berkepentingan.

2.1.5 Model-model Evaluasi Program

Model-model evaluasi yang satu dengan yang lainnya memang tampak bervariasi, akan tetapi maksud dan tujuannya sama yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi yang berkenaan dengan objek yang dievaluasi. Selanjutnya informasi yang telah terkumpul dapat diberikan kepada pengambil keputusan supaya dapat dengan tepat menentukan tindak lanjut mengenai program yang telah dievaluasi.

Kaufman dan Thomas yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2009), membedakan model evaluasi menjadi delapan, yaitu:

- a. *Goal Oriented Evaluation Model*, dikembangkan oleh Tyler. Dalam model ini, seorang evaluator secara terus menerus melakukan pantauan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian yang berkelanjutan ini menilai tentang kemajuan-kemajuan yang dicapai peserta program serta efektifitas

dari temuan yang telah dicapai oleh sebuah program. Salah satu model yang bisa mewakili model ini adalah model kesenjangan atau discrepancy yang dikembangkan oleh Provus. Model ini melihat lebih jauh tentang adanya kesenjangan (*Discrepancy*) yang ada dalam setiap komponen yakni apa yang seharusnya dan apa yang secara riil telah dicapai;

- b. *Goal Free Evaluation Model*, dikembangkan oleh Scriven. *Goal Free Evaluation Model* adalah model evaluasi yang dikembangkan oleh Scriven. Dalam *Goal Free Evaluation*, Scriven mengemukakan bahwa dalam melakukan evaluasi program evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program. Yang perlu diperhatikan dalam program tersebut adalah bagaimana kerjanya (kinerja) suatu program, dengan jalan mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi (pengaruh) baik hal-hal yang positif (yaitu hal yang diharapkan) maupun hal-hal yang negatif (yang tidak diharapkan);
- c. *Formatif Sumatif Evaluation Model*, dikembangkan oleh Michael Scriven. Model ini menunjuk adanya tahapan dan lingkup obyek, yang dievaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada program masih berjalan (disebut evaluasi formatif) dan ketika program selesai atau berakhir (disebut evaluasi sumatif). Pada proses belajar mengajar evaluasi sumatif dilakukan oleh evaluator untuk mendapatkan informasi untuk menentukan keputusan para siswa selama mengikuti proses belajar mengajar.
 - a) Evaluasi sumatif, evaluasi ini dilakukan oleh guru setelah siswa mengikuti proses pembelajaran dengan waktu tertentu, misalnya pada akhir proses belajar mengajar, termasuk akhir semester.

Secara umum evaluasi sumatif bertujuan untuk menentukan posisi siswa dalam kelompoknya terkait dengan penguasaan materi pembelajaran yang telah diikuti. selama satu proses pembelajaran. Fungsi evaluasi sumatif adalah sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan proses pembelajaran, disamping juga menentukan pencapaian hasil belajar yang telah diikuti oleh siswa, selain itu juga untuk mengukur ketercapaian program.

b) Evaluasi formatif, pada prinsipnya dilaksanakan ketika program masih berlangsung atau ketika program masih dekat dengan permulaan kegiatan. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh program yang telah dirancang dapat berlangsung, sekaligus untuk mengidentifikasi hambatan. Dengan diketahui hambatan ini diharapkan dapat mengambil keputusan secara dini dapat mengadakan perbaikan yang mendukung kelancaran pencapaian tujuan program (Arikunto: 2009). Evaluasi ini dilaksanakan secara kontinyu, atau periodik tertentu dalam proses belajar mengajar;

d. *Countenance Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stake. Model yang dikembangkan oleh Stake dan Fernades ini menekankan atau memiliki dua kelengkapan utama pada (a) Diskripsi (description) dan (b) pertimbangan (judgement), serta terbagi menjadi 3 tahapan dalam evaluasi program yaitu anteseden yang diartikan sebagai konteks, transaksi yang diartikan sebagai proses dan keluaran yang mengacu pada output dan outcome yang diartikan sebagai hasil (Suharsimi Arikunto: 2009);

- e. *Responsive Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stake. *Model responsive evaluation* yang dikembangkan oleh Robert Stake, merupakan model yang cocok digunakan untuk mengevaluasi program yang banyak menimbulkan konflik di masyarakat. Keputusan evaluasi berorientasi kepada klien atau pengguna program;
- f. *CSE-UCLA Evaluation Model*. *CSE-UCLA* terdiri dari dua singkatan, yaitu *CSE* dan *UCLA*. *CSE* merupakan singkatan dari *Center for the Study of Evaluation*, sedangkan *UCLA* merupakan singkatan dari *University of California in Los Angeles*. Ciri dari model *CSE-UCLA* adalah adanya lima tahapan evaluasi, yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil dan dampak. Sementara itu, Fernandes (1984) mengemukakan dalam model *CSE-UCLA* ini juga dapat dibagi ke dalam empat tahapan evaluasi, yaitu: (a) *needs assessment*; (b) *program planning*; (c) *formative evaluation*; dan (d) *summative evaluation*. Pada dasarnya, pentahapan yang dikemukakan oleh Fernandes (1984) adalah sama dengan tahapan yang ada pada *CSE-UCLA* model. Tahapan perencanaan dan pengembangan program memerlukan tahapan evaluasi yang disebut *needs assessment*. Pada tahap implementasi, diperlukan evaluasi formatif, sedangkan untuk mengetahui hasil dan dampak program, diperlukan evaluasi sumatif.
- g. Alkin mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses meyakinkan keputusan, memilih informasi yang tepat mengumpulkan, dan menganalisis informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuatan keputusan dalam memilih berbagai alternatif. Ia mengemukakan lima macam evaluasi, yakni: a) *System assessment*, memberikan informasi

tentang keadaan atau posisi sistem. b) *Program planning*, membantu pemulihan program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program. c) *Program implementation*, yang menyiapkan informasi mengenai apakah program telah diperkenalkan pada kelompok tertentu yang tepat seperti yang telah direncanakan. d) Program improvement, memberikan informasi mengenai bagaimana program berfungsi, bagaimana program berjalan, atau bekerja? Apakah menuju pencapaian tujuan, adakah hal-hal atau masalah-masalah baru yang muncul tak terduga? e) Program certification, yang memberikan informasi tentang nilai atau guna program;

- h. *CIPP Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stufflebeam. Isi dari model evaluasi ini terdiri dari: (a) *Context evaluation*: Evaluasi terhadap konteks, evaluasi ini menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan proyek. (b) *Input evaluation*: Evaluasi terhadap masukan, yaitu evaluasi tentang kemampuan awal siswa dan sekolah. (c) *Process evaluation*: Evaluasi terhadap proses, evaluasi ini diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana. (d) *Product evaluation*: Evaluasi terhadap hasil, evaluasi ini diarahkan kepada hal-hal yang menunjukkan adanya perubahan yang terjadi pada masukan mentah. Model ini lebih memandang bahwa pada hakikatnya evaluasi adalah sebuah sistem sehingga model ini akan digunakan untuk mengevaluasi program yang ditugaskan maka mau tidak mau mereka harus menganalisis program tersebut berdasarkan komponen-komponennya;

i. *Discrepancy Model*, dikembangkan oleh Provus. Model ini dikembangkan oleh Malcolm Provus, yang merupakan model yang menekankan pada pandangan adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan program untuk mengukur besarnya kesenjangan yang ada dalam setiap komponen. Dalam hal ini, evaluator mengukur adanya perbedaan (kesenjangan) antara yang seharusnya dicapai (berdasarkan tujuan program) dengan realitas hasil yang dapat dicapai. Objek sasaran evaluasi program (lembaga pendidikan, misalnya) dengan menggunakan *model discrepancy* Provus itu ada lima aspek (kadang ada yang menyebutnya cuma empat), yaitu sebagai berikut:

(a) *Design* (rancangan; program design). Yang dimaksud adalah rancangan kegiatan atau program kerja. Oleh karena itu ada yang menyebutnya dengan program *definition* (penetapan program). Yang dievaluasi mengenaiya adalah ada tidaknya unsur input, proses, dan output; (b) *Installation* (program installation; penyediaan perangkat-perengkapan yang dibutuhkan program). Agar program bisa dilaksanakan, lembaga pembuat program itu tentu harus menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk mendukungnya. Jadi, yang dievaluasi adalah ketepatan berbagai sumber daya, perangkat dan perlengkapan yang tersedia untuk pelaksanaan program; (c) *Process* (*program process*). Yang dimaksud adalah proses pelaksanaan program. Di dalamnya termasuk kepemimpinan dan penugasan-penugasan (*instruction*). Yang dievaluasi adalah keterkaitan (kegayutan) antara sesuatu yang akan diubah, dibangun, dikembangkan dsb; (d) *Product* (program product, hasil program). Yang dievaluasi adalah efektivitas desain atau rancangan program; tegasnya apakah tujuan atau

target program bisa tercapai; (e) *Cost* (biaya, pengeluaran). Yang dimaksud adalah implikasi (kemanfaatan) sosial politik ekonomi apa yang diharapkan bisa tergapai dari pelaksanaan program tersebut.

Model evaluasi yang telah dipaparkan di atas memiliki banyak kesamaan. Pada umumnya perancang model evaluasi menyusun model evaluasi sesuai dengan alur sistem yaitu terdiri dari *input* – proses – *output*. Pada elemen input digunakan beberapa istilah yang memiliki makna serupa yaitu *antecedent* dan *entry capability*. Pada elemen proses digunakan istilah *operation*, *transaction*, *process*. Sedangkan pada elemen output digunakan istilah *result*, *product*, dan *outcome*. Tiap-tiap model evaluasi mempunyai keunggulan yang cocok untuk diterapkan pada situasi tertentu, namun tidak ada satu model pun yang dapat menjawab semua permasalahan evaluasi yang ingin ditelusuri. Selain model-model evaluasi yang telah dipaparkan oleh para ahli tersebut, pada dasarnya peneliti juga dapat mengembangkan model evaluasi yang berbeda dengan yang sudah ada, sesuai dengan kebutuhan akan informasi yang harus dikumpulkan.

2.2 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memandirikan masyarakat sesuai dengan masyarakat sesuai dengan kemampuannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Pemberdayaan masyarakat dapat digunakan untuk mengakses sumber daya lokal sebaik mungkin. Proses pemberdayaan tersebut menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan (*people or community centered development*). Pemberdayaan masyarakat muncul pertama kali pada saat aktivis gerakan black panther memobilisasi politik di USA pada tahun 1960 dan pada pertengahan tahun 80-an

kaum wanita mempopulerkan kembali konsep pemberdayaan. Kini konsep pemberdayaan telah masuk pada berbagai disiplin ilmu politik pada tataran teori maupun praktek dan telah menjadi kata plastis yang digunakan dalam berbagai konteks, sehingga kehilangan makna yang sebenarnya.

Pemberdayaan merupakan terjemahan dari kata “*empowerment*” yang mengandung arti “kekuatan”, sehingga dapat dijabarkan bahwa pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum memiliki kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari seperti makan, pakaian/sandang, rumah/papan, pendidikan, kesehatan. Memberikan kekuatan atau power kepada orang yang kurang mampu atau miskin atau memang merupakan tanggungjawab pemerintah, namun seharusnya mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama masyarakat itu sendiri yang menjadi kelompok sasaran yaitu dengan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan pemberdayaan.

Mardikanto dan Soebianto (2012) mengemukakan bahwa, pemberdayaan sebagai sebuah proses atau srangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan (Dalam arti kemampuan dan keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk di dalamnya individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi, memperoleh kesempatan dan mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas hidup (baik secara individual, kelompok dan masyarakat dalam arti yang luas). Melalui pemahaman tersebut, pemberdayaan dapat diartikan sebagai sesuatu proses yang terencana untuk meningkatkan skala/up grade utilitas dari objek yang

diberdayakan. Pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif, untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki (Gunawan, 2009)

Robert Chambers (Alfitri 2011) seorang ahli yang pemikirannya dan tulisannya banyak dicurahkan untuk kepentingan upaya pemberdayaan masyarakat berpendapat bahwa, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat *people centered* (berpusat pada manusia), *Participatory* (partisipatif), *empowering* (memberdayakan) *and sustainable* (berkelanjutan). Konsep ini lebih luas dan hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut, yang pemikirannya akhir-akhir ini lebih banyak dikembangkan sebagai upaya untuk mencari alternatif terhadap konsep pertumbuhan pada masa yang lalu. Pada hakekatnya, pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditujukan pada individual, tetapi juga secara berkelompok, sebagai bagian dari aktualisasi eksistensi manusia.

Manusia/masyarakat dapat dijadikan sebagai tolok ukur secara normatif, yang menempatkan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai suatu bagian dari upaya untuk membangun eksistensi masyarakat secara pribadi, keluarga, dan bahkan bangsa sebagai aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk itu dalam kegiatan, pemberdayaan masyarakat dibutuhkan adanya pengenalan terhadap hakikat manusia yang akan memberikan sumbangan untuk menambah

wawasan dalam menerapkan berbagai konsep atau program pemberdayaan kepada masyarakat.

Suharto (2010), berpendapat bahwa pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam :

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, tetapi juga bebas mengemukakan pendapat, tetapi juga bebas dari kelaparan, kebodohan dan kesakitan,
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang dibutuhkan dan berkualitas.
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

2.2.1 Tujuan dan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Sebagai suatu kegiatan yang berproses, maka seharusnya program/kegiatan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat mengangkat kehidupan masyarakat diharapkan dapat mengangkat kehidupan masyarakat sebagai suatu kelompok sasaran menjadi lebih sejahtera, berdaya atau mempunyai kekuatan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang utama, dan pada akhirnya akan menciptakan kemandirian dalam masyarakat. Tentunya kemandirian yang dimaksud tidak hanya dari aspek ekonomi saja, tetapi juga secara sosial, budaya, hak bersuara/berpendapat, bahkan sampai pada kemandirian masyarakat dalam menentukan hak-hak politiknya. Masyarakat sudah dapat memahami dan

menentukan sendiri hak politiknya dalam memimpin calon pemimpin (level daerah dan nasional) yang terbaik, maupun dalam memilih calon anggota legislatif sebagai wakil rakyat.

Masyarakat tidak lagi merasa takut karena adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu dalam menentukan pilihan, maupun karena adanya iming-iming/janji-janji yang hanya bersifat *lip service* atau sekedar retorika, atau menentukan pilhan karena adanya sogokan dalam bentuk apapun (sembako, uang, sandang, dll). Pada akhirnya tujuan akhir yang diharapkan dari suatu program/kegiatan pemberdayaan adalah terciptanya kemandirian masyarakat dalam menentukan pilihan yang terbaik bagi mereka

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidak berdayaan, baik karena kondisi internal (persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak berlaku adil). Untuk melengkapi pemahaman tentang pemberdayaan perlu diketahui tentang konsep kelompok lemah dan penyebab ketidakberdayaan yang mereka alami. Mardikanto dan Poerwoko (2012), mengatakan tujuan pemberdayaan meliputi berbagai upaya perbaikan yaitu:

1. Perbaikan pendidikan (*better education*) artinya, pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan tidak hanya sebatas pada perbaikan materi, perbaikan metode, perbaikan menyangkut waktu dan tempat, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat, tetapi seharusnya yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana perbaikan

pendidikan non formal dalam proses pemberdayaan mampu menumbuhkan semangat dan keinginan untuk terus belajar tanpa batas waktu dan umur.

2. Perbaiki aksesibilitas (*better accessibility*), artinya seiring tumbuh dan berkembangnya semangat belajar sepanjang hayat, diharapkan dapat memperbaiki aksesibilitas terhadap sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan/keuangan, penyedia produk peralatan dan lembaga pemasaran.
3. Perbaiki tindakan (*better action*) artinya, melalui bekal perbaikan pendidikan dan aksesibilitas dengan beragam sumber daya (SDM, SDA dan sumber daya lainnya/buatan) yang lebih baik, diharapkan akan melahirkan tindakan-tindakan yang semakin membaik.
4. Perbaiki kelembagaan (*better institution*) artinya, dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan masyarakat, terutama pengembangan jejaring kemitraan-usaha, sehingga dapat menciptakan posisi tawar (*bargaining position*) yang kuat pada masyarakat.
5. Perbaiki usaha (*better business*) artinya, perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan dapat memperbaiki usaha/bisnis yang di jalankan.
6. Perbaiki pendapatan (*better income*) artinya, perbaikan bisnis yang dijalankan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

7. Perbaiki lingkungan (*better environment*) artinya, perbaikan pendapatan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), sendiri karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan karena faktor kemiskinan atau terbatasnya pendapatan.
8. Perbaiki kehidupan (*better living*) artinya, tingkat pendapatan yang memadai dan lingkungan yang sehat, diharapkan dapat memperbaiki situasi kehidupan setiap keluarga serta masyarakat.
9. Perbaiki masyarakat (*better community*) artinya, situasi kehidupan yang lebih baik, dan didukung dengan lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang juga lebih baik.

2.2.2. Prinsip Pemberdayaan

Manusia yang ingin sukses dalam menjalankan suatu kegiatan atau pekerjaannya hendaknya memiliki prinsip dalam bekerja, karena hanya manusia yang punya prinsip yang dapat bekerja sesuai dengan aturan dan komitmen yang telah dibangun dan disepakati bersama dengan seluruh tim kerja, baik para pelaksana maupun dengan kelompok sasaran.

Aswas (2014), mengemukakan bahwa dalam kegiatan pemberdayaan khususnya yang ditujukan kepada masyarakat, aparat/agen pemberdayaan perlu memegang beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan sehingga kegiatan dapat berjalan dengan benar dan tepat, sesuai dengan hakikat dan konsep pemberdayaan. Beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat yang dimaksud meliputi:

1. Pemberdayaan dilaksanakan dengan penuh demokratis, penuh keikhlasan, tidak ada unsur paksaan, karena setiap masyarakat mempunyai masalah, kebutuhan, dan potensi yang berbeda, sehingga mereka mempunyai hak yang sama untuk diberdayakan.
2. Setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat sebaiknya berdasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi yang dimiliki kelompok sasaran. Hal ini dapat diketahui dengan jelas jika identifikasi dan sosialisasi pada tahap awal berlangsung dengan melibatkan penuh kelompok sasaran.
3. Sasaran utama pemberdayaan adalah masyarakat, sehingga harus diposisikan sebagai subjek/pelaku dalam kegiatan pemberdayaan, dan menjadi dasar utama dalam menetapkan tujuan, pendekatan, dan bentuk-bentuk kegiatan pemberdayaan.
4. Menumbuhkan kembali nilai-nilai budaya dan kearifan local, seperti jiwa gotong royong, yang muda menghormati orang yang lebih tua, dan yang lebih tua menyayangi yang lebih muda, karena hal ini menjadi modal sosial dalam pembangunan.
5. Dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, karena merupakan sebuah proses yang membutuhkan waktu, dilakukan secara logis dan sederhana menuju ke hal yang lebih kompleks.
6. Memperhatikan keragaman karakter, budaya, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sudah mengakar atau berlangsung lama secara turun temurun.
7. Memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat terutama aspek sosial dan ekonomi.

8. Tidak ada unsur diskriminasi, utamanya terhadap perempuan
9. Selalu menerapkan proses pengambilan keputusan secara partisipatif, seperti penetapan waktu, materi, metode kegiatan, dan lain-lain.
10. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk, baik yang bersifat fisik (materi, tenaga, bahan) maupun non fisik (saran, waktu, dukungan)
11. Aparat/agen pemberdayaan bertindak sebagai fasilitator yang harus memiliki kemampuan/kompetensi sesuai dengan potensi, kebutuhan, masalah yang dihadapi masyarakat. Mau bekerjasama dengan semua pihak/institusi/maupun lembaga masyarakat/ LSM yang terkait.

2.3. Petani dan Kelompok Tani

2.3.1. Pengertian Petani

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mengatakan bahwa, petani adalah warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Wolf sebagaimana dikutip Teodor Shanin (1985) memberikan istilah untuk petani yang bercirikan: penduduk yang secara eksistensial terlibat dalam cocok tanam dan membuat keputusan otonom tentang proses cocok tanam. Mereka bercocok tanam dan beternak di daerah pedesaan, tidak di dalam ruangan-ruangan tertutup (*greenhouse*) di tengah Kota atau di dalam kotak-kotak yang diletakkan di atas ambang jendela. Dari aspek tempat tinggal, secara umum petani tinggal di daerah pedesaan, dan juga di daerah-daerah pinggiran Kota. Pekerjaan pokok yang

dilakukan untuk kelangsungan hidup mereka adalah di bidang pertanian. Umumnya pekerjaan petani terkait dengan penguasaan atau pemanfaatan lahan.

Mosher (1987) memberi batasan bahwa petani adalah manusia yang bekerja memelihara tanaman dan atau hewan untuk diambil manfaatnya guna menghasilkan pendapatan. Batasan petani menurut Departemen Pertanian Republik Indonesia adalah pelaku utama agribisnis, baik agribisnis monokultur maupun polikultur dari komoditas tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, dan atau komoditas perkebunan. Ciri-ciri masyarakat petani menurut (Sajogyo, 1999) sebagai berikut:

1. Satuan keluarga (rumah tangga) petani adalah satuan dasar dalam masyarakat desa yang berdimensi ganda.
2. Petani hidup dari usaha tani dengan mengolah tanah (lahan)
3. Pola kebudayaan petani berciri tradisional dan has
4. Petani menduduki posisi rendah dalam masyarakat, mereka adalah “orang kecil” terhadap masyarakat di atas desa.

Adapun “petani kecil” dengan ciri-ciri sebagai berikut (Arie Sujito, 2013)

1. Berusahatani dalam tekanan penduduk local yang meningkatkan
2. Mempunyai sumberdaya terbatas sehingga menciptakan tingkat hidup yang rendah
3. Bergantung seluruhnya atau sebagian kepada produksi yang subsisten, dan
4. Kurang memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya. (Arie Sujito, 2013).

2.3.2. Pengertian dan Tujuan Kelompok Tani

Kelompok tani merupakan wadah tempat bernaungnya beberapa petani/peternak/pekebun sebagai tempat belajar, bekerjasama dan unit produksi yang dibentuk atas dasar kesamaan domisili dan hamparan lahan pertanian (RI Wahyuni, 2003). Kelompok tani terbentuk dari keinginan petani untuk menjalankan usahatani mereka secara bersama-sama, agar bisa mendapatkan hasil akhir yang maksimal. Umumnya, anggota kelompok tani ini saling terikat oleh hubungan pertalian darah (kekeluargaan,kaum,suku) dan hubungan tidak bertali darah (pertemanan/persahabatan) yang di peerat dengan unsur-unsur pengikat seperti kecenderungan saling tukar kebaikan, rasa saling percaya, norma agama/sosial, nilai-nilai, dan tindakan proaktif dari pimpinan (Reza at al, 2016).

Tujuan dibentuknya kelompok tani supaya petani dapat menjalankan usaha taninya secara bersama-sama sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan usahatani yang dijalankan oleh anggota dan kelompok dengan beberapa prinsip kehidupan berkelompok diantaranya adalah prinsip partisipatif (Mardikanto, 2009; barat (2012); Martiningsih (2012); Yumi at al (2012); Tarigan (2005); dan Nasution (2002), menyimpulkan bahwa adanya hubungan antara partisipasi anggota kelompok dengan modal sosial dalam berbagai bentuk seperti kekeluargaan, pertemanan, kesamaan agama, penerapan norma, nilai-nilai, kesamaan nasib, kesamaan suku.

2.4. Peraturan Pembentukan Program Kelompok Tani Pada Dinas Pertanian Kabupaten Karo

Peraturan yang menjadi dasar terbentuknya program pemberdayaan kelompok tani pada Dinas Pertanian Kabupaten Karo adalah sesuai dengan Peraturan Bupati Karo nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan daerah adalah Kabupaten Karo, Dinas Pertanian adalah Lembaga Independen yang dibentuk Bupati yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan dan Pembangunan pedesaan. Memiliki system pertanian yang merupakan rangkaian keseluruhan pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan. Penyuluh pertanian harus mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya. Pertanian harus mencakup Tanaman pangan, Holtikultura, Perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

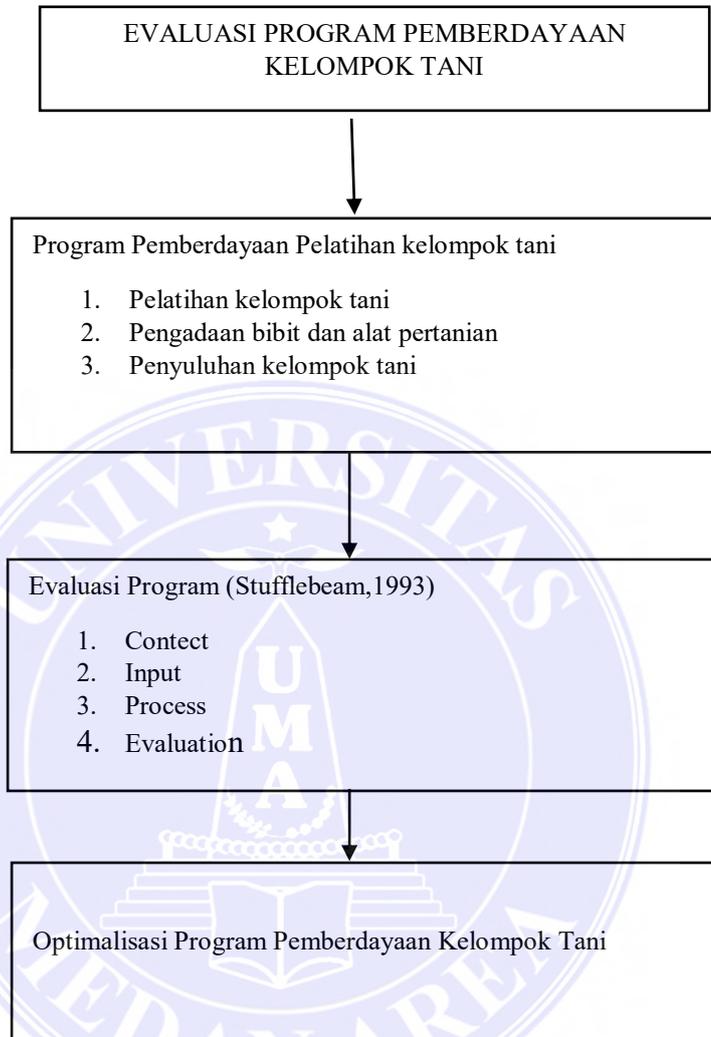
2.5. Kerangka Berpikir

Juliansyah (2011), mengatakan bahwa kerangka berpikir adalah kerangka pikir yang menjelaskan hubungan antara variabel yang terlibat dalam penelitian. Adapun kerangka penelitian tentang evaluasi program pemberdayaan kelompok tani pada di Kabupaten Karo adalah sebagai berikut :

Program pemberdayaan kelompok tani merupakan salah satu cara pemerintah untuk menyejahterakan petani di Kabupaten Karo. Kelompok tani menjadi wadah mereka dalam berdiskusi tentang berbagai jenis dan cara bercocok tanam yang baik, sebagai wadah untuk mendapat bantuan untuk pertanian dari pemerintah. Namun pada kenyataannya para petani di Kabupaten Karo masih sering mengeluh tentang harga hasil panen mereka yang tidak stabil di pasaran karena harganya yang berubah-ubah, harga pupuk dan obat-obatan yang tinggi dan cuaca yang tidak mendukung sehingga sering kali para petani gagal panen.

Mengukur optimalnya evaluasi program pemberdayaan kelompok tani pada Dinas Pertanian Kabupaten Karo dibutuhkan yang namanya evaluasi program. Evaluasi program yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menurut Stufflebeam (1993) yang meliputi *input*, *contect*, *process*, dan *evaluation*. Dengan tujuan untuk mengetahui evaluasi program pemberdayaan kelompok tani pada Dinas Pertanian Kabupaten Karo serta untuk melihat apakah program tersebut sudah mendapat hasil yang optimal atau tidak.

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir



Sumber: oleh peneliti 2023

2.6. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu

No.	NAMA/TAHUN/SUMBER	JUDUL	HASIL
1	Mariana Thania Ambun/2020/Skripsi Prodi Ilmu Pemerintahan	Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok	Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani sudah baik, hal tersebut dilihat dari pembinaan pengembangan potensi kelompok tani,

		Tani (Studi Kelompok Tani Sido Maju di Desa Bleberan,DIY)	sosialisasi atau penyuluhan, pengadaan bibit dan alat penunjang pertanian.
2	Agus Muhajir/2018/skripsi program studi sosiologi	Pemberdayaan Masyarakat Oleh Aparatur Gampong Melalui Usaha Ternak Bebek di Gampong Kampong Tengoh Kabupaten Nagan Raya	Pemberdayaan yang dilakukan oleh aparatur Gampong dilakukan dengan pemberdayaan, dorongan bagi masyarakat, agar berpartisipasi dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan tersebut dapat meningkatkan SDM serta kesejahteraan rakyat.
3	Wahyudi/2021/skripsi prodi ilmu sosial dan politik	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Tani Di Gampong Teupin Ara	Strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh kelompok tani dilakukan dengan penjelasan tentang pemberdayaan, pengontrolan, observasi langsung, dan memberikan pelayanan untuk masyarakat dalam mengalami kendala selama proses bertani.
4	Serli,Hijra/2021/skripsi prodi Pengembangan Masyarakat Islam	Pemberdayaan Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup (Studi Kelompok Tani Muda Sepakat Desa Tunggul Bute, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat)	Hasil dari kegiatan pemberdayaan adalah masyarakat terutama kelompok tani dan masyarakat sekitar memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkannya. Di samping itu juga menciptakan masyarakat yang mandiri dalam menjalankan usahanya da mampu meningkatkan pendapatannya.
5	Sayid Basrah Lubis/2020/Skripsi Prodi Pengembangan Masyarakat Islam	Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Petani Desa Ujung Serdang Kecamatan Tanjung	Peran pemerintah desa Ujung Serdang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dalam pemberdayaan petani memiliki peranan yang sangat baik dalam peningkatan pertanian di desa yaitu sebagai fasilitator, pemberian informasi pada kelompok tani, memotivasi

		Morawa Kabupaten Deli Serdang	kelompok tani, pengawas dan pelaksana dalam distribusi bantuan pupuk, pembimbing dan pengarah untuk petani.
6	Didin dinda rukmana, Bagus Haryono/2021/Jurnal Pembangunan dan Perubahan Sosial	Evaluasi Hasil Program Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Di Desa Kaliabu, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perempuan desa Kaliabu yang bekerja sebagai petani dan buruh tani masih memiliki waktu luang untuk digunakan melakukan kegiatan yang lebih produktif dan bermanfaat. Untuk itu program kelompok wanita tani mengembangkan 2 program yaitu kegiatan budidaya tanaman dan program pembenihan ikan.
7	Fatimah Alfiani/2021/Jurnal	Evaluasi Program Pemberdayaan Kelompok Tani Rukun Berbasis Pertanian Terpadu	Hasil evaluasi program pemberdayaan Kelompok Tani Rukun Berbasis Pertanian Terpadu menunjukkan bahwa sudah menunjukkan beberapa keberhasilan yang bisa dicapai dan mendapatkan penghargaan di Tingkat nasional.

Sumber: oleh peneliti 2023

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya dapat dilihat dari teori yang dipakai dalam penelitian, lokasi dan waktu penelitian, bentuk-bentuk pemberdayaan serta bentuk penyuluhan yang dilakukan kelompok tani dalam memberdayakan petani dan kelompok tani. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian pertama berfokus pada pengembangan kelompok tani, penelitian kedua berfokus pada usaha pemberdayaan melalui usaha ternak bebek, penelitian ketiga lebih fokus kepada pendampingan kelompok tani, penelitian keempat fokus pada pemanfaatan sumber daya dan potensi kelompok tani, dan penelitian kelima berfokus sebagai fasilitator kelompok tani.

Persamaan penelitian saya dengan kelima penelitian diatas adalah sama-sama menggunakan menggunakan metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif dan kelimanya membahas tentang pemberdayaan kelompok tani.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang data-datanya berupa kata-kata (bukan angka-angka) yang berasal dari wawancara, catatan laporan, dokumen dan lain-lain. Atau penelitian yang didalamnya mengutamakan untuk pendeskripsian secara analisis suatu peristiwa atau proses bagaimana adanya dalam lingkungan yang alami untuk memperoleh makna yang mendalam dari hakikat proses tersebut (Sugiyono,2017).

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yang merupakan penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subyek berupa individu, organisasi, industri atau perspektif yang lain. Adapun tujuannya adalah untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati, menjelaskan karakteristik atau masalah yang ada. Pada umumnya penelitian deskriptif ini tidak membutuhkan hipotesis, sehingga dalam penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai Evaluasi Program Pemberdayaan Kelompok Tani Pada Dinas Pertanian Kabupaten Karo peneliti akan langsung terjun ke lapangan dan mengkaji seluruh subjek dengan melakukan interaksi langsung.

3.2. Informan Penelitian

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Berikut informan atau narasumber yang diperlukan untuk penelitian yang akan dilakukan di Dinas Pertanian Kabupaten Karo agar diperoleh data yang lebih tepat dan akurat.

1. Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama.

Terdapat empat kriteria dalam menentukan informan kunci (Martha & Kresno, 2016):

1. Harus menjadi peserta aktif dalam kelompok, organisasi atau budaya yang diteliti atau telah melalui tahap enkulturasi.
 2. Harus terlibat dalam budaya yang diteliti, karena jangan sampai informan kunci lupa dengan masalah yang akan diteliti.
 3. Harus memiliki waktu yang memadai. Informan kunci tidak cukup hanya memiliki kemauan, namun dapat memberikan informasi kapan pun saat dibutuhkan.
 4. Harus menyampaikan informasi dengan bahasa sendiri (natural).
Sebaiknya informan yang menyampaikan dengan “bahasa analitik” dihindari karena informasi yang dihasilkan sudah tidak natural.
2. Informan utama dalam penelitian kualitatif adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari.
3. Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif.

Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci.

Tabel 3.1. Informan Penelitian

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karo	1	Informan Kunci
	Kepala bidang penyuluhan	1	Informan Utama
	Kepala seksi penyuluhan pertanian	1	Informan Tambahan
2	Penyuluh pertanian dan pelatihan	3	Informan Tambahan
3	Anggota kelompok tani dan masyarakat	5	Informan Tambahan
JUMLAH		11	

Sumber : oleh peneliti 2023

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subyek maupun sampel penelitian). Teknik pengumpulan data merupakan suatu kewajiban, karena teknik pengumpulan data ini nantinya digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan seperangkat peralatan yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian (Kristianto, 2018). Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi (sugiono,2017).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi, observasi adalah mengumpulkan data langsung dari lapangan (Semiawan, 2010). Sedangkan menurut (Kristianto, 2018) observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian ia menyimpulkan dari apa yang ia amati itu. Pengamat adalah kunci keberhasilan dan ketepatan hasil penelitian (Yusuf, 2014). Salah satu keuntungan dari observasi ini adalah bahwa sistem analisis dapat lebih mengenal lingkungan fisik seperti tata letak ruangan serta peralatan dan formulir yang digunakan serta sangat membantu untuk melihat proses serta kendala-kendalanya.

1. Wawancara, wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam sebuah penelitian. Atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh lewat teknik lain sebelumnya. Karena merupakan proses pembuktian, maka bisa saja hasil wawancara sesuai atau berbeda dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Agar wawancara efektif, maka terdapat berapa tahapan yang harus dilalui menurut (Yunus, 2010: 358) yakni: Mengenalkan diri, Menjelaskan maksud kedatangan, Menjelaskan materi wawancara dan Mengajukan pertanyaan.

2. Dokumentasi: menurut Juliansyah Noor (2011) berbicara tentang banyak fakta dan data yang disimpan dalam bahan sebagai dokumentasi. Sifat umum data ini melampaui ruang dan waktu, memungkinkan peneliti untuk mempelajari peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif (yusuf, 2014).
3. Triangulasi: Triangulasi digunakan untuk mengecek kebenaran data yang dilakukan untuk memperkaya data. Triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari sebuah riset.

3.4 Teknik Analisa Data

Analisa data dilakukan apabila data yang diperoleh berupa kumpulan wujud kata-kata dan bukan rangkaian angka dan tidak dapat disusun dalam kategori-kategori klasifikasi. Analisis kualitatif menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan atau statistika sebagai alat bantu. Kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1.Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang di dapat dari lapangan, selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi yaitu mengkode, membuat ringkasan, menelusuri tema, menulis memo dan membuat partisi. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan dipusatkan dalam aneka macam cara yaitu melalui ringkasan dan uraian singkat, menggolongkan ke dalam sebuah pola yang lebih luas.

2.Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan yang paling penting dalam penelitian kualitatif. Penyajian data adalah kumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif dapat dilakukan dengan membuat matriks, bagan dan grafik. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu padan.

3.Menarik Kesimpulan

Kesimpulan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian yang digunakan, kecakapan peneliti. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis mulai mencari benda-benda, mencatat keteraturan, alur sebab-akibat, dan proposisi sehingga kesimpulan yang mulanya belum jelas akan lebih terperinci.

3.5. Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.5.1 Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Dinas Pertanian Kabupaten Karo untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Peneliti memilih lokasi ini untuk mendeskripsikan dan melihat evaluasi program pemberdayaan kelompok tani di Kabupaten Karo.

3.5.2 Jadwal Penelitian

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

No.	Uraian Kegiatan	2022			2023						2024			
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Okt	Jan	Feb	Mar
1.	Pengajuan Judul	■												
2.	Bimbingan Proposal		■	■	■	■	■	■						
3.	Seminar Proposal							■						
4.	Penelitian								■	■	■			
5.	Seminar Hasil											■		
6.	Bimbingan												■	■
7.	Sidang Meja Hijau													■

Sumber: Oleh peneliti 2024

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Program Pemberdayaan Kelompok Tani Pada Dinas Pertanian Kabupaten Karo, Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Evaluasi dari keempat Indikator yaitu konteks sudah cukup berhasil namun belum optimal. Dinas Pertanian Kabupaten Karo sudah mengetahui masalah petani serta membuat Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu Sumber Daya Manusia yang menjadi pelaksana dalam program pemberdayaan kelompok tani belum memadai sehingga pemerataan pelaksanaannya program pemberdayaan kelompok tani tersebut membutuhkan waktu yang lama.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan kelompok tani pada Dinas Pertanian Kabupaten Karo adalah indikator input karena masih rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia khususnya petani di Kabupaten Karo sehingga petani terus berfokus kepada cara tradisional serta sulitnya menjangkau keseluruhan Kelompok Tani Pada Kabupaten Karo dikarenakan jumlah pelaksana yang kurang memadai.

5.2. Saran

Setelah merangkum kesimpulan diatas, peneliti akan menjabarkan saran yang merupakan hasil analisis dari yang peneliti temukan.

Adapun saran-saran yang ingin peneliti berikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Karo sebagai pelaksana Program Pemberdayaan Kelompok Tani di Kabupaten Karo sebagai berikut:

1. Dinas Pertanian Kabupaten Karo disarankan:

- a. Melakukan workshop identifikasi dan pengembangan potensi pemberdayaan kelompok tani.
- b. Menyusun pedoman pengembangan potensi suatu pertanian berbasis pemberdayaan kelompok tani
- c. Menjalin kerja sama dengan *stakeholder* terkait optimalisasi pemberdayaan kelompok tani.

2. Kelompok Tani Kabupaten Karo disarankan:

- a. Membentuk forum kelompok tani di Kabupaten Karo
- b. Melakukan inovasi produk tanaman dari hasil pertanian yang potensial
- c. Melakukan promosi untuk pemasaran hasil pertanian

3. Peneliti selanjutnya, disarankan agar meningkatkan lagi ketelitian dalam kelengkapan data dan lebih memfokuskan penelitian berbasis potensi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- A.Muri Yusuf. 2014. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenamedia Group.
- Arikunto, D.S. 1999. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara
- Arikunto, Suharsimi. 1998. Evaluasi Program. Yogyakarta: IKIP Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safruddin Abdul Jabar. 2009. Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis bagi Mahasiswa dan Pratisi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bahua, M.I 2015. Penyuluhan dan pemberdayaan petani indonesia. Gorontalo: Ideas Publishing
- Budi Winarno. 2008. Kebijakan Publik, Pt. Buku Kita: Jakarta
- Chambers, Robert. 1996. "PRA (Participatory Rural Appraisal) Memahami Desa Secara. Partisipatif". Yogyakarta: Penerbit Kanisuis.
- D.S. 2017. Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu. Aceh: Bandar Publishing
- Dr. Z.M 2014. Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik. Jakarta: Kencana
- Dumasari 2020. Pengantar Ekonomi Pertanian. Jakarta: Lp3es
- Edi Suharto 2010. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung:
- Endang Mulyatiningsih, 2011. Evaluasi Proses Suatu Program, Bumi Aksara. Jakarta
- Hikmat, H. 2010. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung : Humaniora
- Isaac, S., & Michael, W.B. 1981. Handbook in research and evaluation. California: Edits Publishers.
- Kristanto, V. H. 2018. Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah. Yogyakarta: Deep publish.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2013. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Mardikanto, Totok. 1993. Penyuluhan Pembangunan Pertanian. Sebelas Maret University Press. Surakarta
- Martha, Kresno, E. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Bidang Kesehatan. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Noor, Juliansyah, 2011. Metode Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Raco, J. R., dan Conny R. Semiawan. 2010. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya. Jakarta: Grasindo.
- Sujito, Arie. 2013. Kontek dan Arah Pembaruan Desa Dalam Advokasi RUU Desa. Yogyakarta: Jurnal Mandatory IRE
- Soetomo, 2011. Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sugiono 2010 Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2008), Evaluasi Program Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2009. Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV
- Stufflebeam, Daniel L.1971. The CIPP Model For Evaluation, dalam Daniel L. Stufflebeam, dkk. (eds), Evaluation in Education and Human Service, Boston: Kluwer Academic Publisher.

ARTIKEL ILMIAH (JURNAL, SKRIPSI, TESIS/ DISERTASI) :

- Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Jurnal MODERAT, Volume 5, Nomor 4. November 2019, hlm 460-473
- Fitria Rohmawati, Lally, 2012. Pemberdayaan Petani Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan. Administrasi Publik, Vol 2, No 1, (Hal 147-153)
- Kusmana, E. 2019. Garis, Regi Refian. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanian Oleh Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL) Wilayah Binaan.
- Mariana Thania Ambu. 2020. Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani (Studi Kelompok Tani Sido Maju di Desa Bleberan, DIY). Skripsi. Unversitas Negeri Yogyakarta

REGULASI/ KEBIJAKAN :

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang pedoman Penumbuhan pengembangan kelompok tani dan gabungan kelompok tani
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani.
- SK Menteri Pertanian RI Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 Tentang Kelompok Tani
- Undang-undang No 19 Tahun 2003 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

LAMPIRAN I. PEDOMAN OBSERVASI

EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KARO

1. Identitas Observasi

Lembaga yang diamati : Dinas Pertanian Kabupaten Karo
 Lokasi : Jalan Veteran, Kabupaten Karo
 Hari/tanggal : 6 Juni -30 Juli 2023

2. Aspek-aspek yang diamati

Meninjau secara langsung lokasi penelitian
 Mengamati secara langsung program pemberdayaan kelompok tani yang sudah berjalan
 Mengamati kelompok tani dalam pelaksanaan program pemberdayaan yang berjalan

3. Melihat ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung jalannya Lembar observasi

No	Yang diamati	Ada	Tidak	Bukti/Indikator
1	Visi dan Misi	✓		
2	Program Pemberdayaan	✓		
3	Struktur organisasi	✓		
4	Kelompok tani dan masyarakat	✓		

LAMPIRAN II PEDOMAN WAWANCARA

EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KARO

Wawancara ini dilakukan berdasarkan teori evaluasi program menurut Stufflebeam (1994) yang memiliki 4 indikaor yaitu:

1. Indikator Contex
2. Indikator Input
3. Indikator Process
4. Indikator Product

1. Kebutuhan apa yang belum terpenuhi dalam pemberdayaan kelompok tani
2. tujuan apa yang belum tercapai dari pemberdayaan kelompok tani
3. program pemberdayaan apa yang sudah diberikan kepada kelompok tani di kabupaten karo
4. apakah program, pemberdayaan yang diberikan sudah berdampak jelas bagi kelompok tani.
5. apakah seluruh kelompok tani di Kabupaten Karo sudah merasakan program pemberdayaan yang disediakan?
6. bagaimana reaksi kelompok tani dalam menerima program pelatihan dan penyuluhan yang diberikan?
7. apakah pengetahuan kelompok tani meningkat dengan adanya program pemberdayaan tersebut
8. Apakah penyuluh pertanian sudah sanggup menangani kegiatan pemberdayaan?
9. Apakah penyuluh pertanian diberikan pelatihan sebelum menjalankan program pemberdayaan?
10. Apa sarana dan prasarana yang disediakan dalam pemberdayaan kelompok tani?
11. Apa faktor penghambat dalam menjalankan program pemberdayaan kelompok tani?
12. apa kebutuhan kelompok tani yang sudah dipenuhi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Karo?
13. Apa target yang diharapkan dengan adanya pemberdayaan kelompok tani sudah tercapai?

Lampiran II Hasil Wawancara

1. Identitas Responden

Nama : Ir. Metehsa Purba
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 60
Pekerjaan : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karo

Pertanyaan narasumber kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karo :

1. Apakah staff pelaksana dari dinas pertanian diberi pelatihan sebelum turun ke lapangan untuk melakukan penyuluhan?

Jawaban; tentu kami tidak bisa begitu saja melepas staff pelaksana kami turun ke masyarakat begitu saja kami pasti juga dulu melatih staff kami Bersama orang yang lebih ahli dan juga kami juga menyediakan modul untuk mereka pelajari (wawancara 6 juni 2023, jam 10.00 WIB).

2. Bagaimana cara mengumpulkan para kelompok tani untuk menerima penyuluhan?

Jawaban: ya kami berkoordinasi dengan penyuluh pertanian yang sudah ada di tiap kecamatan baru dia yang meneruskan ke pemerintah desa dan kelompok tani yang ada di desa itu (wawancara 6 juni 2023, jam 10.00 WIB)

3. Bagaimana pembiayaan dalam pelaksanaan program pemberdayaan kelompok tani di Kabupaten Karo. (wawancara 6 juni 2023. Jam 10.00 WIB)

Jawaban: untuk pembiayaan kita dapat dari APBD yang ada tetapi tidak banyak

4. Apa harapan bapak dengan adanya program pelatihan tersebut bagi kelompok tani?

Jawaban: ya harapan kami agar kelompok tani itu bisa lebih terampil dan mendapat pengetahuan baru agar mereka lebih mandiri dan Sejahtera. (wawancara 6 juni 2023, jam 10.00 WIB)_

2. Identitas Responden

Nama : Ajaren Sinuraya

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 56 tahun

Pekerjaan : Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian
Kabupaten Karo

Pertanyaan narasumber kepada Kabid Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Karo :

1. Masalah apa yang dirasakan petani di Kabupaten Karo saat ini?

Jawaban: masalah permodalan dan mahalnya harga pupuk dan pestisida tanaman (wawancara , 12 juni 2023, jam 10.00 wib)

2. Apa kendala yang dirasakan dalam melakukan pemberdayaan kelompok tani?

Jawaban: kurangnya jumlah penyuluh pertanian sedangkan kelompok tani kurang lebih ada 3000 (wawancara 12 juni 2023, jam 10.00 wib)

3. Bantuan apa yang sudah diberikan kepada kelompok tani?

Jawaban: bantuan bibit, pupuk, dan cara pembuatan pupuk organik. (wawancara 12 juni 2023, jam 10.00 WIB)

4. Apa yang dilakukan Dinas Pertanian untuk membantu mengatasi kesulitan modal yang dirasakan petani?

Jawaban: untuk membantu petani dalam permodalan sudah ada yang namanya KUR (kredit usaha rakyat) yang sudah disosialisasikan ke pemerintah desa dan dapat diajukan untuk mendapat modal usaha dengan jumlah bunga yang rendah. (wawancara 12 juni 2023, jam 10.00 WIB)

3. Identitas Responden

Nama. : Rejakim Pintubatu S.P

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : 46 Tahun

Pekerjaan. : Seksi Penyuluh Dinas Pertanian Kabupaten Karo

Pertanyaan kepada seksi penyuluh

1. Program apa yang dilakukan dalam pemberdayaan kelompok tani di kabupaten Karo?

Jawaban: program pelatihan pembuatan pupuk organik, cara perawatan tanaman

(wawancara, 13 juni 2023, jam 12.00 Wib)

2. Bagaimana reaksi kelompok tani dalam menerima program pemberdayaan yang diberikan?

Jawaban: reaksi mereka baik dan senang

(wawancara, 13 juni 2023, jam 12.00 wib)

3. Bagaimana proses dalam pelaksanaan program pemberdayaan kelompok tani?

Jawaban: kita bekerja sama dengan kecamatan dan pemerintah desa untuk mendapatkan data kelompok tani setiap kecamatan dan kebutuhan apa yang dibutuhkan.

(wawancara, 13 juni 2023, jam 12.00 wib)

4. Apa sarana dan prasarana yang disediakan dalam pelaksanaan program pemberdayaan kelompok tani?

Jawaban: kita sudah menyediakan alat dan bahan dalam pembuatan pupuk organik, puluk cair dan juga menyediakan orang yang ahli dalam bidang tersebut.

(wawancara, 13 juni 2023, jam 12.00 wib)

5. Apa tujuan program pemberdayaan kelompok tani tersebut?

Jawaban: untuk membantu petani dalam menghadapi masalahnya dan mensejahterakan petani.

4. Identitas Responden

Nama : Hana Linda br Tarigan
Jenis kelamin : perempuan
Umur : 40 tahun
Pekerjaan : penyuluh pertanian dan pelatihan

Pertanyaan kepada penyuluh pertanian dan pelatihan

1. Apa penyuluh pertanian sudah mampu memberikan program pelatihan kepada kelompok tani?

Jawaban: sudah cukup mampu karena kita juga didampingi orang yang lebih ahli
(wawancara, 21 juni 2023, jam 10.00 wib)

2. Apakah penyuluh diberikan pelatihan terlebih dahulu sebelum terjun kelapangan untuk memberikan pelatihan kepada kelompok tani?

Jawaban: ya kami diberi pelatihan juga dan disediakan modul untuk belajar. (wawancara, 21 juni 2023, jam 10.00 wib)

3. Apa hambatan yang dirasakan dalam pemberian pelatihan kepada kelompok tani?

Jawaban: masalahnya sulitnya mengatur jadwal pertemuan dengan para anggota kelompok tani. (wawancara, 21 juni 2023, jam 10.00 wib)

4. Apakah kelompok tani sudah melaksanakan semua program yang diberikan?

Jawaban: Sebagian sudah karena mereka sudah membuat kompos sendiri dan memang membuat pupuk organik yang sudah diajarkan tetapi ada juga yang tidak melakukannya dan malah lebih tetap memilih pupuk di pasaran. (wawancara , 21 juni 2023, jam 10.00 WIB)

5. Bagaimana reaksi kelompok tani jika diberikan penyuluhan program pertanian?

Jawaban: Mereka menerima dengan baik dan cukup antusias tetapi mereka menjalankannya atau tidak belum terlalu berjalan (wawancara 21 juni 2023, jam 10.00 WIB)

5. Identitas Responden

Nama : Rezeki karo-karo

Jenis kelamin : laki-laki

Umur : 58 Tahun

Pekerjaan : Petani

Pertanyaan kepada Ketua Kelompok Tani Desa Aji Siempat

1. Bantuan apa yang diberikan dinas pertanian kepada kelompok tani Ajisiempat?

Jawaban: bantuan pupuk subsidi, bantuan pelatihan pembuatan pupuk cair dan subsidi (wawancara, 2 juli 2023, jam 13.00 wib)

2. Apakah kesulitan bapak dalam mengumpulkan kelompok tani jika ada penyuluhan dari Dinas Pertanian?

Jawaban: kesulitannya itu susah mengatur waktu mereka karena mereka kadang merasa tidak penting dan lebih memilih ke ladang mereka (wawancara, 2 juli 2023, Jam 10.00 WIB)

3. Apa reaksi anggota kelompok tani jika di berikan penyuluhan atau pelatihan?

Jawaban: reaksi mereka bisa menerima tetapi mengatur jadwalnya itu nya agak sulit (wawancara, 2 juli 2023, jam 10.00 WIB)

4. Apa masalah yang dirasakan petani saat ini?

Jawaban: sudah pasti dari permodalan, harga tani yang tidak sebanding dengan modal, hama dan cuaca. (wawancara 2 juli 2023, jam 10.00 WIB)

5. Apa manfaat yang dirasakan setelah adanya program pemberdayaan dari Dinas Pertanian?

Jawaban: manfaatnya yaitu kami bisa mendapat pupuk subsidi, tau cara membuat pupuk. (Wawancara, 2 juli 2023, jam 10.00 WIB)

6. Identitas responden

Nama : Eva Br Sinuhaji

Jenis kelamin : perempuan

Umur : 50 tahun

Pekerjaan : Petani

Pertanyaan kepada ketua kelompok tani desa simpang empat

1. Apa hasil setelah adanya program pemberdayaan kelompok tani dari Dinas Pertanian Kabupaten Karo?

Jawaban: dengan adanya program ini kelompok tani lebih mandiri dan mengerti membuat pupuk, cara merawat tanaman yang baik dan mampu membuat pupuk sendiri (wawancara, 3 juli 2023, jam 10.00 wib)

2. Apa masalah yang dirasakan petani saat ini?

Jawaban: masalah modal dan harga pupuk dan obat yang melonjak tinggi (wawancara, 3 juli 2023, jam 10.00 wib)

3. Apakah kelompok tani desa Simpang Empat sudah melaksanakan program pemberdayaan yang sudah di berikan Dinas Pertanian?

Jawaban: sudah karena kami sudah bisa membuat pupuk organic dan cara perawatan tanaman yang baik dan benar (wawancara, 3 juli 2023, jam 10.00 wib)

4. Apakah pihak pemerintah desa mengkoordinasikan kepada kelompok tani jika ada program penyuluhan dari pemerintah?

Jawaban: sudah baik karena setiap informasi yang berhubungan dengan petani dan kelompok tani mereka akan langsung beritahu (wawancara, 3 juli 2023, jam 10.00 wib)

7. Identitas Responden

Nama : kresta colia

Jenis kelamin : laki-laki

Umur : 65 Tahun

Pekerjaan : Petani

Pertanyaan kepada anggota kelompok tani Desa jandi Meriah

1. Apa manfaat yang dirasakan setelah adanya program pemberdayaan kelompok tani dari dinas pertanian Kabupaten karo?

Jawaban : manfaat yang saya rasakan dengan adanya pelatihan dari kelompok tani adalah saya jadi tahu cara merawat jagung yang baik dan bisa membuahkan hasil yang melimpah (wawancara, 3 juli 2023, jam 11.00 wib)

2. Apakah ibu mengikuti jika diadakan penyuluhan bagi kelompok tani?

Jawaban: jika tidak berhalangan saya pasti akan ikut jika berhalangan ya tidak (wawancara, 3 juli 2023, jam 11.00 wib)

3. Sebagai petani, apa yang dibutuhkan atau yang menjadi permasalahan saat ini bagi petani?

Jawaban: masalah yang saya rasakan sebagai petani yaitu masalah modal, harga pupuk sama cuaca yang tidak menentu (wawancara, 3 juli 2023, jam 11.00 wib)

4. Apa alasan ibu untuk bergabung dengan kelompok tani?

Jawaban: alasan saya karena saya lihat bahwa mereka sering memberikan bantuan dan pelatihan dan saya lihat juga bermanfaat saya jadinya bergabung. (wawancara, 3 juli 2023, jam 11.00 wib)

8. Identitas Responden

Nama : Pengalamen Br Pelawi

Jenis kelamin : perempuan

Umur : 60 Tahun

Pekerjaan : petani

Pertanyaan kepada anggota kelompok tani desa Tigapanah

1. Apa manfaat yang dirasakan dengan adanya program pemberdayaan kelompok tani dari Dinas Pertanian Kabupaten Karo?

Jawaban: saya merasa terbantu karena adanya pupuk subsidi yang harganya lebih murah dan terjangkau dari harga toko. (wawancara, 3 juli 2023, jam 08.00 wib)

2. Program pemberdayaan apa saja yang sudah ibu terapkan dalam mengolah lahan ibu?

Jawaban: saya sudah mengerti bahwa menanam tanaman sejenis sayuran harus dikasi pupuk dan obat sebagai dasar dulu dan tidak asal-asalan lagi. (wawancara, 3 juli 2023, jam 08.00 wib)

3. Menurut ibu apakah para pelaksana program dari Dinas Pertanian sudah baik dalam memberikan pelatihan?

Jawaban: yang saya lihat sudah baik ya karena mereka mampu memberikan bahasa yang bisa kami mengerti dan membuat prakteknya juga. (wawancara, 3 juli 2023, jam 08.00 wib)

4. Bantuan apa yang sudah ibu dapat sebagai anggota kelompok tani?

Jawaban: bantuan pupuk subsidi sama cara merawat tanaman yang baik dan benar. (wawancara, 3 juli 2023, jam 08.00 wib)

9. Identitas Responden

Nama : Mahrizal Tarigan

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : 39 Tahun

Pekerjaan : Petani

Pertanyaan kepada Anggota Kelompok Tani Desa Ajijahe

1. Apa manfaat yang dirasakan dengan adanya program pemberdayaan kelompok tani Dari Dinas Pertanian Kabupaten Karo?

Jawaban: manfaat yang saya rasakan saya bisa membuat pupuk sendiri, menanam tanaman dengan baik dan menambah pengetahuan saya tentang pertanian. (wawancara, 5 juli 2023, jam 12.00 wib)

2. Apa masalah bapak yang rasakan saat ini sebagai petani?

Jawaban: masalah yang paling dirasakan saat ini adalah masalah modal pastinya dan juga harga pupuk dan obat”an pada tanaman (wawancara, 5 juli 2023, jam 12.00 wib)

3. Apakah program pemberdayaan dari Dinas Pertanian yang sudah bermanfaat bagi bapak dalam mengembangkan tanaman dan ladang bapak?

Jawaban: program pupuk bersubsidi karena saya bisa mendapatkan pupuk dengan harga yang lebih murah untuk menambah kesuburan tanaman saya dan juga cara merawat tanaman. (wawancara, 5 juli 2023, jam 12.00 wib)

4. Apa reaksi bapak jika ada penyuluhan dari Dinas Pertanian Kabupaten Karo bagi kelompok tani?

Jawaban: ya saya antusias karena saya akan mendapat pengetahuan baru lagi untuk saya bisa praktekkan dalam ladang saya dan kadang juga jika ada pertemuan seperti itu mereka memberikan konsumsi juga (wawancara, 5 juli 2023, jam 12.00 wib)

Lampiran III DOKUMENTASI



Bapak Ajaren Sinuraya, Ibu Hana Linda Br Tarigan, dan Bapak Rejakim Pintubatu S.p



Bapak Rezeki karo-karo dan ibu Eva sinuhaji selaku ketua kelompok tani desa Ajisiempat dan desa Simpang Empat

Dokumentasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Kelompok Tani Oleh Dinas

Pemberian alat penangkap lalat buah jeruk untuk kelompok tani desa Kutabuluh dan Pemberian pestisida untuk mengatasi wereng coklat pada padi kepada kelompok tani desa Laubaleng



Panen kentang hasil dari bibit kentang yang diberikan dinas pertanian Kabupaten Karo kepada kelompok Tani Desa Sumbul dan pelatihan cara pembuatan bio enzim kepada kelompok tani desa Kutagaloh



LAMPIRAN V. SURAT SELESAI MELAKUKAN RISET



PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PERTANIAN

Jalan. Veteran Nomor. 24 Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara
TELP. (0628) 20003 FAX. 20315

Kabanjahe, 21 Agustus 2023

Nomor : 500.6/ 2021 /Distan/2023
Lampiran : -
Perihal : Pengambilan Data/Riset

Yth. Dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area
di
Medan

Sehubungan dengan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 300/0722/Bakesbang/2023 Tanggal 29 Mei 2023 Perihal Rekomendasi maka dengan ini memberikan keterangan kepada nama di bawah ini :

Nama : Bina Lorensia Br Sembiring
Nim : 198520056
Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan bahwa nama di atas telah selesai melaksanakan penelitian atau pengambilan data di Dinas Pertanian Kabupaten Karo dengan judul : " Evaluasi Program Pemberdayaan Kelompok Tani Padi Dinas Pertanian Kabupaten Karo".

Demikian surat keterangan ini disampaikan untuk dapat digunakan seperlunya.

KEPALA DINAS PERTANIAN



Ir. METEHSA KARO-KARO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640825 199403 1 004

Tembusan :
1. Yang Bersangkutan